

## Ruang Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan

Iqbal Firdaus dan R.R. Siri Munawaroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin  
Jl. H. Hasan Basry No. 9-11 Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

### Info Artikel

#### Keywords:

Capital expenditure; Potential economic growth; Regional fiscal space.

✉ Corresponding Author:  
Iqbal Firdausi:  
Tel. /Fax. (0511) 3304652  
E-mail: -

### Abstract

*This study aims to find the role of regional fiscal space in the potential economic growth, mediated by capital expenditure. The study was conducted on regency and municipal in Kalimantan Selatan province with an SEM approach. The magnitude of the fiscal space can provide widespread discretion space for the regional executive in developing its regional development potential. The findings of this study prove the existence of the significant influence of fiscal space on economic growth. Adequate fiscal space can create flexibility for local governments, increasing discretion for local executives to encourage creativity and innovation in developing regional opportunities and potentials to foster economic growth. The effective utilization of fiscal space is also affected by capital expenditure. Evident from the findings of this study indicate the role of capital expenditure mediation on the influence of regional fiscal space on regional economic growth.*

© 2018 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Kinerja perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil kurang memuaskan. Meskipun di awal pemerintahan presiden Joko Widodo dan para ekonominya menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% rata-rata pertahun, tetapi sejak tahun 2014 dimulainya pemerintahan Joko Widodo, hingga per Desember 2017, pertumbuhan ekonomi melambat di kisaran 5-5,3% per tahun, (BPS, 2018). Secara umum ekonomi Indonesia menanggung beban yang cukup berat akibat pengaruh ketidakpastian yang timbul akibat gejolak perekonomian global. Krisis ekonomi yang saat ini melanda negara-negara di Eropa serta gejolak harga minyak dunia akibat krisis politik di Timur Tengah berdampak terhadap perekonomian nasional. Begitu pula yang terjadi di daerah, pertumbuhan

ekonomi melambat, terutama bagi daerah yang mengandalkan ekspor yang bersumber dari SDA seperti pertambangan batubara dan migas seperti di Kalimantan Selatan.

Menghadapi situasi semacam ini, pemerintah harus memperkuat daya tahan ekonomi agar dapat memertahankan *sustainability development*, mengatasi ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan. Salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas perekonomian ialah melalui kebijakan fiskal (Griggs, et al., 2013). Sebagai alat distribusi pendapatan, kebijakan fiskal merupakan perangkat yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Jimenez, 2015). Dalam kondisi resesi, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan permintaan agregat ekonomi makro, sehingga pengaruh dari guncangan krisis dapat diredam sampai pada tingkat yang serendah mungkin (Alsharari dan

Abougamos, 2017). Negara-negara di Afrika banyak menggunakan *fiscal space* untuk mengurangi kemiskinan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan. Untuk daerah di Indonesia yang relevan adalah menciptakan *fiscal space* yang memungkinkan untuk dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sektor lainnya yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan *sustainability development goals* (SDGs).

Renyaan, *et. al.* (2012) menunjukkan bahwa ketika dikelola, otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mampu memperbaiki kinerja pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas pembiayaan daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi luasnya ruang fiskal, karena faktor efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Penelitian Supriyanto (2015) menyimpulkan bahwa ruang fiskal dan PAD berpengaruh positif terhadap KPPD (kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra (2016) terhadap 70 kabupaten/kota, menemukan Rata-rata Ruang Fiskal dari 53 Kabupaten sebesar 28%, kemudian hanya 4 Kabupaten yang memiliki Ruang Fiskal di atas 50% sedangkan 35 daerah lainnya memiliki tingkat Ruang Fiskal di bawah 30%. Kota Surabaya mendapatkan peringkat pertama dengan Ruang Fiskal yang baik yaitu 56% dari total pendapatan. Menurut analisis Fitra (2016) kota Surabaya memiliki sistem, regulasi dan tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan kestabilan kondisi politik, ekonomi dan sosial. Maka, tidak mengherankan jika Ruang Fiskalnya mencapai 56%. Dengan besarnya Ruang Fiskal tersebut maka Pemkot Surabaya dapat melakukan

pembangunan yang lebih mendorong pada perkembangan kota tersebut.

Menurut Heller (2006) *fiscal space* adalah “*the availability of budgetary room that allows a government to provide resources for a given desired purpose without any prejudice to the sustainability of a government's financial position.*” Terdapat anggaran yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan *mandatory spending* atau belanja yang sudah ditetapkan undang-undang yang sudah ditentukan porsi dan peruntukannya. Sisa dari anggaran yang sudah ditetapkan peruntukannya disebut dengan ruang fiskal. Ruang fiskal biasanya digunakan untuk pembangunan/belanja infrastruktur, sehingga menghasilkan atau memelihara aset produktif (Zhao, 2011). Semakin lebar atau luas ruang fiskal daerah, maka semakin besar diskresi kebijakan eksekutif daerah yang dapat dilakukan untuk mendorong mengembangkan potensi daerahnya, sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Hubungan antara kebijakan fiskal dengan ruang fiskal adalah apabila kebijakan fiskal dilakukan secara tepat, maka ruang fiskal dapat diperlebar. Artinya, ruang fiskal daerah sangat ditentukan oleh kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah. Dengan catatan, pemerintah harus tetap menjaga ketahanan fiskal atau *Fiscal sustainability* (Leith dan Wren-Lewis, 2006). *Fiscal sustainability* adalah kondisi ketika pemerintah mampu membuat kebijakan fiskal yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian melalui solvabilitas keuangan jangka panjang. Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah

diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri (IFAC, 2016).

Salah satu ukuran kualitas pengeluaran pemerintah (*government spending*) yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal dibandingkan dengan belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Menurut Burhanuddin (2002) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat. Parameter tersebut menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dasar oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (Bose, *et. al.*, 2007b; Sasmal, *et. al.*, 2016). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa (Lewis, 2013). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), atau pendapatan *output* per kapita (WorldBank, 2006).

Hasil penelitian Renyaan, *et. al.* (2012) membuktikan adanya pengaruh efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta didukung pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan mendorong perluasan ruang fiskal daerah. Penelitian Supriyanto (2015) menyimpulkan bahwa ruang fiskal dan PAD berpengaruh terhadap KPPD dengan arah positif. Hasil penelitian terhadap 879 observasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ruang fiskal, tingkat ketergantungan dan rasio ke-mandirian daerah

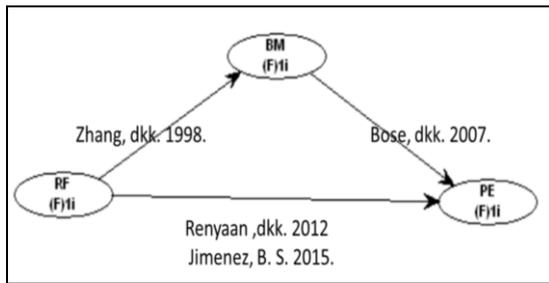
terhadap KPPD. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif, sementara itu ruang fiskal dan PAD berpengaruh positif terhadap KPPD. Kajian analisis APBD yang dilakukan oleh Fitra (2016) menyimpulkan bahwa ruang fiskal mendorong pemerintah bertindak kreatif dan inovatif terhadap perkembangan kotanya.

Penelitian yang dilakukan Abachi dan Salamatu (2012) di Nigeria, secara umum menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode waktu 1970–1990 dan 1991–2009, sedangkan penelitian Lozano-Espitia dan Julio-Román (2015) di Amerika Latin (Kolumbia) menunjukkan bahwa terdapat peranan positif dan signifikan desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan lokal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Oates (1993); (Bose, *et. al.*, 2007a), menyimpulkan bahwa keuangan yang terdesentralisasi pada prinsipnya memiliki peran potensial dalam pembangunan ekonomi. Potensi ini akan menjadi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada sejumlah kondisi penting mengenai responsivitas institusi lokal terhadap kesejahteraan lokal yang pada gilirannya, sangat bergantung pada struktur fiskal yang sehat.

Penelitian terdahulu pada umumnya mengangkat isu ruang fiskal dikaitkan dengan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat ruang fiskal menciptakan kebebasan pemerintah lokal untuk menggunakan anggarannya. Sedangkan penelitian ini, menguji ruang fiskal dari perspektif kausalitas yang berbeda, yaitu terkait peran belanja modal dalam memediasi pengaruh ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan tinjauan teori dan telaah penelitian terdahulu, serta tujuan penelitian, makarerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Rerangka Konseptual Penelitian

Sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Ruang fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
 H<sub>2</sub>: Ruang fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang berjumlah sebanyak 11 kabupaten dan 2 kota. Seluruh populasi diteliti untuk masa tahun anggaran 2012-2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa profil pemerintah daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota yang telah diaudit, realisasi APBD, LRA, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Data diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id>); Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (<http://bpk.go.id/>); Kementerian Dalam Negeri (<http://kemendagri.go.id>), (<http://otda.kemendagri.go.id>), Biro Pusat Statistik (<http://bps.go.id>), serta BPS Kalimantan Selatan.

Data APBD yang dianalisis adalah *time series* selama lima tahun untuk 13 kabupaten dan kota yang menggambarkan secara *cross sectional* seluruh variabel yang diobservasi. Penggabungan data ini dikenal sebagai data panel, sehingga jumlah data yang dianalisis adalah untuk 13 kabupaten dan kota dikali

dengan 5 tahun, yaitu sebanyak 65 *observed data*.

Dilihat dari sudut pandang hubungannya, variabel penelitian ini diklasifikasikan atas variabel *laten* endogen dan variabel *laten* eksogen (Chandrarini, 2017). Berdasarkan kerangka konseptual dan rumusan hipotesis yang telah dilakukan, serta identifikasi klasifikasi variabel, maka variabel penelitian ini adalah:

X<sub>1</sub> = Ruang Fiskal Daerah - variabel eksogen

Y<sub>1</sub> = Belanja Daerah - variabel endogen

Y<sub>2</sub> = Pertumbuhan Ekonomi - variabel endogen

#### Definisi operasional variabel penelitian

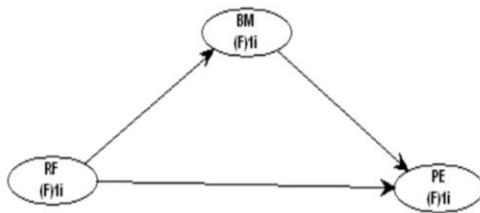
Ruang Fiskal adalah keseluruhan pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah; pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus dan dana penyesuaian serta dana darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu belanja pegawai dan belanja bunga dan selanjutnya dibagi dengan keseluruhan pendapatan daerah.

Variabel belanja modal ini diukur dengan menggunakan rasio belanja modal dibagi dengan total pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan riil PDRB Harga Berlaku.

Pertumbuhan ekonomi (PE) dapat dirumuskan :

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rancangan dan tujuan penelitian, maka teknik analisis yang digunakan adalah metode *Structural Equation Modeling* (SEM)-PLS dengan menggunakan program Software WarpPLS 6.0. Sebagai salah satu teknik analisis multivariat, SEM-PLS memungkinkan dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga menjadikannya teknik analisis yang efisien (Hair Jr, *et. al.*, 2014). Berdasarkan teknik SEM, maka model persamaan struktural yang dirancang sesuai pengembangan kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2: Model SEM

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Data Penelitian

Hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi WarpPLS-

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	SD
RF	0,106	0,663	0,448	0,103
BM	0,1500	0,654	0,479	0,223
PE	2,470	7,170	5,524	1,064

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

##### Analisis Model Persamaan Struktural

Pada **Error! Reference source not found.** dapat diketahui  $R^2$  (*R-Squared Coefficients*) masing-masing variabel laten endogen Belanja Modal sebesar 0,25 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan variabel eksogen (ruang fiskal) yang dihipotesiskan memiliki korelasi positif terhadap variabel endogen. Sedangkan *Full Collinearity VIFs* ditujukan untuk menguji kemungkinan terjadinya bias terhadap hasil penelitian akibat multikolinearitas, yaitu dengan kriteria *Full Collinearity*

SEM versi 6.0 menghasilkan statistik yang disajikan pada tabel 1. Berdasarkan hasil deskripsi data menunjukkan tingkat ruang fiskal di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan selama 2012-2016, rata-rata terendah adalah 0,106 atau 11 persen dan tertinggi 0,663 atau 66 persen dengan rata-rata 0,448 atau 45 persen. Sedangkan rata-rata alokasi belanja modal 48 persen dan terendah 15 persen, serta tertinggi 65 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, terendah 2,5 persen dan tertinggi 7,2 persen.

*VIFs value* harus di bawah 3,3 (Kock,2011). Berdasarkan *out-put* pada **Error! Reference source not found.**, masing-masing variabel memiliki nilai kurang atau di bawah 3,3, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini bebas dari masalah kolinearitas. Begitu pula terhadap pengujian  $Q^2$  (*Q-squared*), yang berguna untuk menguji validitas prediktif dan relevansi antara variabel prediktor dan kriteria, dengan kriteria harus lebih besar dari nol. Berdasarkan tabel 3, semua nilai  $Q^2 > 0,0$ , artinya semua variabel model ini dinyatakan valid.

Tabel 2. Latent Variable Coefficients

	RF	BM	PE
R-squared coefficients		0,25	0,45
Adjusted R-squared coefficients		0,212	0,221
Full collinearity VIFs	1,290	1,260	1,049
Q-squared coefficients		0,253	0,452

Sumber: Output WarpPLS 6.0. (2018)

Tabel 3: Uji Kualitas dan Kesesuaian Model

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.321, P=0.001
Average R-squared (ARS)=0.187, P=0.029
Average adjusted R-squared (AARS)=0.167, P=0.040
Average block VIF (AVIF)=1.040, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.200, acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3.3$
Tenenhaus GoF (GoF)=0.432, small $\geq 0.1$ , medium $\geq 0.25$ , large $\geq 0.36$
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$ , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if $\geq 0.9$ , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if $\geq 0.7$

Sumber: Output WarpPLS 6.0 (2018)

### Uji Kesesuaian Model

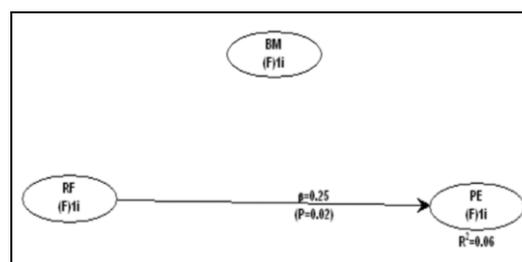
Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut terhadap model, terlebih dahulu dilakukan pengujian *model fit and quality indices* (*Goodness of Fit*) untuk menentukan kelayakan model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator utama, yaitu *Average path coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS), VIF (AVIF) dan *Average Full VIF* (AFVIF), yang menentukan kualitas dan kesesuaian model telah memenuhi kriteria. Nilai APC = 0,321, P=0,001, berarti signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan ARS=0,187, P<0,029, menunjukkan rata-rata koefisien jalur determinansi signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan AVIF = 1.040 dan AFVIF = 1.200, menunjukkan bahwa model bebas dari bias multikolinearitas, karena memenuhi kriteria berada di bawah nilai ideal 3,3. Begitu pula nilai uji kesesuaian dengan metode *Tennenhaus GoF* (*goodness of fit*) menunjukkan nilai kesesuaian dan relevansi data sebesar 0,432; termasuk kategori *large*  $\geq 0,36$ . Hal ini menunjukkan bahwa model yang diajukan didukung oleh data yang relevan dan dapat diandalkan. Hasil uji *R-squared contribution ratio* (RSCR)=1,000, *acceptable if*  $\geq 0,9$ , ideally = 1, menunjukkan rasio kontribusi yang ideal. Hasil keseluruhan uji *Fit and Quality Indices* ini menunjukkan bahwa model yang diajukan didukung oleh data yang relevan, valid dan dapat diandalkan.

### Pengujian Hipotesis

Menurut Hair Jr, *et. al.* (2014) prosedur pengujian hipotesis dengan metode SEM-PLS dapat ditempuh dengan dua tahap berikut:

- 1). Melakukan pengujian *direct effect*

Sebelum melakukan pengujian peran mediasi alokasi belanja modal antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu dilakukan pengujian *direct effect* (pengaruh langsung) antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ini merupakan syarat mutlak untuk memvalidasi efek hubungan tidak langsung suatu variabel *intervening* (pemediasi).

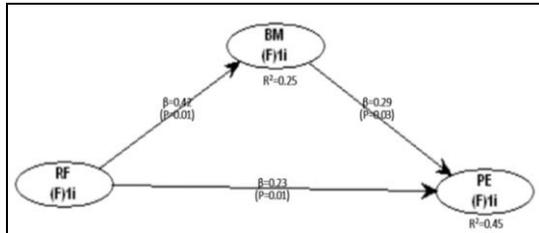


Gambar 3. Direct Effect RF terhadap PE

Berdasarkan gambar 3 diperoleh temuan adanya pengaruh yang positif antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,25 dan signifikan pada tingkat 0,05 ( $p=0,02$ ). Temuan ini membuktikan bahwa penelitian ini menerima hipotesis  $H_1$  yang menyatakan ruang fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2). Melakukan estimasi *indirect effect*

Berdasarkan hasil pengujian *indirect effect* (pengaruh tidak langsung) antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peran mediasi belanja modal (Gambar 4), dan diuraikan pada tabel 4.



Gambar 4. Pengujian Model Indirect Effect

Penjelasan hasil pengujian koefisien jalur dan nilai signifikansi antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (RF  $\rightarrow$  PE), ruang fiskal terhadap belanja modal (RF  $\rightarrow$  BM), dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (BM  $\rightarrow$  PE), dapat dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4: Koefisien Path & P Value Indirect Effect

	Coeff Path	P Value
RF $\rightarrow$ PE	0,23	0,01
RF $\rightarrow$ BM	0,42	0,01
BM $\rightarrow$ PE	0,29	0,03

Sumber: Output WarpPLS 6.0.

Perbandingan antara langkah pertama (*indirect effect test*) dan ke dua (*direct effect test*), menunjukkan perubahan hasil estimasi

di antara kedua pengujian. Pengaruh langsung RF  $\rightarrow$  PE: 0,25 ( $p=0,02$ ) berubah menjadi (uji pengaruh tidak langsung): 0,23 ( $p=0,01$ ), menunjukkan penurunan koefisien jalur, tetapi tetap signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Perubahan ini membuktikan bahwa, belanja modal mampu memediasi pengaruh antara ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh mediasi belanja modal dilakukan dengan pengujian VAF (*Variance Accounted For*), yang mengukur seberapa besar belanja modal menyerap pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika nilai VAF di atas 80%, maka menunjukkan peran mediasi penuh, jika di antara 20-80 persen, maka dapat dikategorikan mediasi parsial. Namun jika kurang dari 20 persen, menunjukkan hampir tidak ada peran mediasi (Hair Jr, et. al., 2014).

Berdasarkan uji model sebelumnya, maka dapat dihitung VAF. Berdasarkan analisis dengan metode perhitungan VAF (tabel 5) ditemukan variabel belanja modal dapat berperan sebagai mediasi dengan pengaruh total 35%, karena berada pada interval 20-80%, maka tergolong mediasi parsial. Kesimpulannya, hasil pengujian membuktikan sekaligus bahwa hipotesis ke dua ( $H_2$ ) dapat diterima. Hipotesis ke dua menyatakan bahwa ruang fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Tabel 5: Uji Total Effect (Perhitungan VAF Value)

Hubungan Variabel	Perhitungan	Jumlah	Kategori
RF $\rightarrow$ BM $\rightarrow$ PE	Pengaruh tidak langsung= RF $\rightarrow$ BM: 0,42 BM $\rightarrow$ PE; 0,29 (0,42 $\times$ 0,29)	0,12	
	Pengaruh Langsung: 0,23	0,23	
	Pengaruh Total	0,35 atau 35 %	Mediasi parsial

**Pembahasan**

**Pengaruh ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, disim-

pulkan bahwa penelitian ini menerima hipotesis  $H_1$  yang menyatakan ruang fiskal daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung hasil penelitian Oates (1993), Zhang dan Zou (1998), Lozano-Espitia dan Julio-Román (2015), yang menyatakan di negara

industri dan berkembang, desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Abachi & Salamatu (2012) yang secara umum menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Ruang fiskal yang memadai dapat menciptakan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, meningkatkan diskresi (Yilmaz, *et. al.*, 2010) bagi eksekutif daerah sehingga mendorong kreatifitas dalam mengembangkan peluang dan potensi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal yang memadai juga mendorong potensi pe-nerapan paradigma *New Public Management*. Sebaliknya, ruang fiskal yang terbatas akan mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi program dan kebijakan pemerintah pusat, yang kontraproduktif terhadap tujuan desentralisasi.

### **Peran mediasi belanjamodal atas pengaruh ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi**

Berdasarkan analisis dengan metode perhitungan VAF, ditemukan bahwa variabel belanja modal dapat berperan sebagai pemediasi parsial atas pengaruh ruang fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Suwandi dan Tahar (2016) yang menyimpulkan alokasi belanja modal dapat memediasi hubungan antara ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Meskipun terdapat perbedaan variabel eksogen yang diuji antara penelitian ini dengan Suwandi dan Tahar (2016), namun secara substansial sama-sama mengukur hubungan kinerja keuangan pemerintah lokal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga mendukung temuan Siregar (2015) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak mengkonfirmasi adanya peran mediasi belanja modal.

Peran belanja modal dalam memediasi hubungan antara ruang fiskal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya diskresi pemerintah daerah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun mediasi ini tergolong parsial yang dapat berarti terjadi sempitnya ruang fiskal yang berakibat kecilnya peluang pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menjalankan kebijakan ekonomi lokal. Atau terdapat kemungkinan ruang fiskal yang luas tetapi terjadi inefisiensi dalam belanja daerah sehingga tidak teralokasikan secara optimal ke dalam belanja modal. Sebagaimana diketahui, proporsi belanja modal merupakan fungsi produktifitas belanja pembangunan

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Besaran ruang fiskal dapat memberikan ruang diskresi yang luas bagi pihak eksekutif daerah dalam mengembangkan potensi pembangunan daerahnya. Temuan penelitian ini membuktikan adanya pengaruh signifikan ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal yang memadai dapat menciptakan fleksibilitas bagi pemerintah daerah, meningkatkan diskresi bagi eksekutif daerah sehingga mendorong kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan peluang dan potensi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ruang fiskal yang memadai juga mendorong potensi pe-nerapan paradigma *New Public Management*. Sebaliknya, ruang fiskal yang terbatas akan mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi program dan kebijakan pemerintah pusat, yang kontraproduktif terhadap tujuan desentralisasi.

Pemanfaatan ruang fiskal yang efektif juga dipengaruhi oleh belanja modal. Terbukti dari temuan penelitian ini menunjukkan adanya peran mediasi belanja modal atas pengaruh ruang fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal merupakan fungsi efektifitas anggaran pengeluaran pemerintah, karena belanja mo-

dal akan menghasilkan aset-aset produktif jangka panjang dalam rangka pelayanan publik. Efek belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi yang mampu mendorong produktifitas ekonomi masyarakat, seperti penurunan beban produksi, memberikan kemudahan akses industri maupun permodalan, serta peningkatan akses pasar dan sarana prasarana lainnya.

Temuan hasil penelitian ini membuktikan adanya peran mediasi parsial belanja modal atas pengaruh ruang fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah meningkatkan ruang fiskalnya dengan cara meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah, utamanya berupaya meningkatkan porsi rasio belanja modal terhadap jumlah pendapatan. Semakin luas ruang fiskal akan menyebabkan semakin luas pula diskresi pemerintah dalam menggunakan sumberdaya keuangan daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah.

### Saran

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, dengan memperluas lingkup penelitian ataupun menambahkan variabel-variabel lainnya yang belum diuji.

### DAFTAR PUSTAKA

Abachi, P., dan I. Salamatu. 2012. An analysis of the effect of fiscal decentralisation on economic growth in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 2 No 8.

Alsharari, N. M., dan H. Abougamos. 2017. The processes of accounting changes as emerging from public and fiscal reforms. *Asian Review of Accounting* 25 (1):2-33.

Badrudin, R., dan B. Siregar. 2015. The evaluation of the implementation of regi-

onal autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets* 7 (1):1-11.

Bose, N., M. E. Haque, dan D. R. Osborn. 2007a. Public expenditure and economic growth: a disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School* 75 (5):533-556.

Bose, N., M. E. Haque, dan D. R. Osborn. 2007b. Public Expenditure And Economic Growth: A Disaggregated Analysis For Developing Countries. *The Manchester School* Vol 75 No. 5 (3):329-343.

Burhanuddin, A. 2012. Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analysis Journal* 1 (1).

Chandrarini, G. 2017. *Metode Penelitian Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta.

Fitra, S. 2016. *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dan The Ford Foundation (FF).

Griggs, D., M. Stafford-Smith, O. Gaffney, J. Rockström, M. C. Öhman, P. Shyam-sundar, W. Steffen, G. Glaser, N. Kanie, dan I. Noble. 2013. *Policy: Sustainable development goals for people and planet*. *Nature* 495 (7441):305-307.

Hair Jr, J. F., G. T. M. Hult, C. Ringle, dan M. Sarstedt. 2014. *A primer on partial least squares structural equation modeling*. Sage Publications. Washington, DC.

Halim, A. 2012. *Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.

Heller, P. S. 2006. The prospects of creating 'fiscal space' for the health sector. *Health Policy and Planning* 21 (2):75-79.

IFAC. 2016. *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2016 Edition, Vol.2 The International Public Sector Accounting Standards Board*.

Jimenez, B. S. 2015. The Fiscal Performance of Overlapping Local Governments. *Public Finance Review* 43 (5):606-635.

- Kock, N. 2011. Using WarpPLS in e-collaboration studies: An overview of five main analysis steps. *International Journal of e-Collaboration* 7(2): 1-18.
- Leith, C., dan S. Wren-Lewis. 2006. *Fiscal sustainability in a New Keynesian model*.
- Lewis, W. A. 2013. *Theory of economic growth*. Vol. 7: Routledge.
- Lozano-Espitia, L. I., dan J. M. Julio-Román. 2015. *Fiscal decentralization and economic growth: evidence from regional-level panel data for Colombia*. Banco de la República Documentos de Trabajo.
- Oates, W. E. 1993. Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal* 46 (2):237-243.
- Ostry, J. D., A. R. Ghosh, J. I. Kim, dan M. S. Qureshi. 2010. *Fiscal space: International Monetary Fund*, Research Department.
- Renyaan, J. P. A., S. Ubud, M. S. Idrus, dan Djumahir. 2012. Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province). *International Journal of Business and Management Invention* Vol.1 (Issue 1 ):16-21.
- Sasmal, Ritwik, dan Joydeb. 2016. Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics* Volume 43 (issue 6 ).
- Supriyanto, Y. 2015. *Pengaruh Ruang Fiskal Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikasi Korupsi*, Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Suwandi, K. A., dan A. Tahar. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *InFestasi* 11 (2):118-136.
- WorldBank. 2006. *Local Governance In Developing Countries*. edited by A. Shah. THE WORLD BANK. Washington, D.C.
- Yilmaz, S., Y. Beris, dan R. Serrano-Berthet. 2010. Linking local government discretion and accountability in decentralisation. *Development Policy Review* 28 (3):259-293.
- Zhang, T., dan H.-f. Zou. 1998. Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics* 67 (2):221-240.
- Zhao, B. 2011. *The Fiscal Impact of Potential Local-Option Taxes*. Federal Reserve Bank of Boston, Boston.